

# Manajemen Administrasi dan Keuangan di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo

## *(Administrative and Financial Management in Bajo Village, Tilamuta Subdistrict, Boalemo Regency)*

Umar Sako Baderan<sup>1\*</sup>, Felmi D. Lantowa<sup>2</sup>, Dharmawaty S. Makur<sup>3</sup>, Rusly Abdurrahman Idji<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

[usbaderan@umgo.ac.id](mailto:usbaderan@umgo.ac.id)<sup>1\*</sup>, [felmi.lantowa@umgo.ac.id](mailto:felmi.lantowa@umgo.ac.id)<sup>2</sup>, [dharmawaty@umgo.ac.id](mailto:dharmawaty@umgo.ac.id)<sup>3</sup>,

[ruslyidji@umgo.ac.id](mailto:ruslyidji@umgo.ac.id)<sup>4</sup>



### Riwayat Artikel

Diterima pada 03 Juli 2025

Revisi 1 pada 10 Juli 2025

Revisi 2 pada 19 Juli 2025

Revisi 3 pada 23 Juli 2025

Disetujui pada 08 Agustus 2025

### Abstract

**Purpose:** This community service aimed to improve the capacity of village apparatus and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in managing village administration and financial reporting based on accountability and transparency principles.

**Methodology/approach:** The activity was conducted in Bajo Village, Tilamuta Sub-district, Boalemo Regency. A participatory workshop method was applied, involving lectures, discussions, and hands-on practice. The materials covered included village administrative document management, simple bookkeeping, and financial report preparation in accordance with applicable regulations. The program utilized printed materials, Microsoft Excel for bookkeeping exercises, and interactive group discussions to enhance participants' understanding.

**Results/findings:** The activity improved participants' knowledge, technical skills, and awareness regarding good governance practices. Village apparatus became more capable of preparing administrative records and cash-based accrual financial reports. Participants also demonstrated a positive shift in attitude towards the importance of transparency and accountability in financial management.

**Conclusion:** The activity enhanced village governance capacity, showing that training and assistance are key to improving accountability and professionalism in administrative and financial management.

**Limitations:** The program was limited in scope to basic administrative and financial management and did not cover advanced digital tools due to limited digital literacy and infrastructure at the village level.

**Contribution:** This activity contributes to the field of public administration, particularly in strengthening local governance at the village level. It supports capacity building for rural institutions and provides a practical model for other community engagement initiatives in administrative and financial training.

**Keywords:** *Administration, Bajo Village, Finance, Management.*

**How to Cite:** Baderan, U. S., Lantowa, F. D., Makur, D. S., Idji, R. A. (2025). Manajemen Administrasi dan Keuangan di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 4(2), 69-75.

## 1. Pendahuluan

Desa Bajo yang terletak di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, secara langsung merasakan implikasi kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menandai perubahan penting dalam struktur tata kelola dengan memberikan transfer fiskal yang substansial melalui mekanisme Dana Desa, sehingga memungkinkan desa untuk memulai program pembangunan yang mencerminkan prioritas lokal dan konteks sosial budaya mereka. Upaya desentralisasi tersebut sejalan dengan visi yang lebih luas untuk mempromosikan pembangunan pedesaan yang inklusif dan partisipatif (Ramadani & Syafitri, 2021).

Namun demikian, di samping manfaat dari peningkatan ruang fiskal, tantangan tata kelola baru juga muncul, terutama terkait dengan tuntutan pengelolaan administrasi dan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan dana desa secara efisien sangat bergantung pada kemampuan kelembagaan, termasuk dokumentasi yang terorganisasi dengan baik, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem informasi yang tangguh (Putri & Hidayat, 2022). Pengamatan awal di Desa Bajo menunjukkan bahwa sistem administrasi masih dikelola secara manual. Metode tradisional ini rentan terhadap ketidakakuratan pencatatan, keterlambatan penyampaian laporan, dan potensi kehilangan data. Selain itu, keterbatasan integrasi teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan pejabat desa terus menghambat terbentuknya praktik tata kelola modern. Kekurangan administrasi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk pengembangan kapasitas dan adopsi perangkat digital dalam administrasi desa.

Studi terkini menekankan bahwa tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel hanya dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dan transformasi digital secara berkelanjutan. Pemerintah desa harus merangkul inovasi teknologi tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas publik dalam mengelola sumber daya publik (Lestari et al., 2023). Tanpa adanya reformasi ini, potensi transformatif desentralisasi fiskal berisiko terkikis oleh struktur kelembagaan yang lemah di tingkat akar rumput. Dalam hal pengelolaan keuangan, meskipun pemerintah desa seperti Desa Bajo telah mengacu pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam pelaksanaannya anggaran masih menemui beberapa kendala baik teknis maupun struktural. Salah satu kendala yang cukup krusial adalah masih terbatasnya pemahaman aparat desa tentang perencanaan anggaran yang partisipatif dan akuntabel. Minimnya kapasitas tersebut sering kali menghambat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.

Studi terkini menunjukkan bahwa kekurangan kompetensi manajerial dan dukungan kelembagaan yang tidak memadai merupakan faktor umum yang menghambat tata kelola keuangan yang efektif di tingkat desa (Kurniawan & Lestari, 2022). Dalam banyak kasus, pejabat desa lebih fokus pada kepatuhan administratif daripada perencanaan keuangan strategis, yang melemahkan keselarasan antara belanja publik dan prioritas pembangunan. Selain itu, tantangan juga muncul dalam aspek pengawasan dan pelaporan keuangan. Meskipun ruang kelembagaan seperti Musyawarah Desa (Musdes) secara formal disediakan untuk memfasilitasi pengawasan publik, partisipasi masyarakat masih relatif pasif dan dangkal. Minimnya keterlibatan aktif warga tidak hanya melemahkan semangat tata kelola pemerintahan yang partisipatif, tetapi juga mempengaruhi tingkat transparansi dan efektivitas pengelolaan dana publik (Yusuf et al., 2023).

Engelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel merupakan hal mendasar untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat akar rumput. Hal ini memerlukan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, mekanisme pelaporan yang konsisten, dan keterlibatan publik yang bermakna (Widodo & Santoso, 2021). Prinsip-prinsip dasar perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian administrasi publik tetap penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola desa. Prinsip-prinsip ini, yang berasal dari teori administrasi klasik, terus relevan ketika diadaptasi ke dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendorong perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan berorientasi pada masyarakat (Putra & Safitri, 2022).

alam konteks tata kelola desa, penerapan paradigma administrasi modern semakin diperlukan untuk menanggapi tuntutan penyediaan layanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Salah satu kerangka kerja yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah konsep Manajemen Publik Baru (New Public Management/NPM), sebagaimana diutarakan oleh Hood dan dibahas lebih lanjut oleh (Sako A. R. K., 2024), yang menekankan efisiensi, desentralisasi, pengukuran kinerja, dan manajemen yang berorientasi pada hasil di sektor publik. Penerapan prinsip-prinsip NPM dalam administrasi desa berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses administrasi dan keuangan, sehingga mendorong tata kelola yang lebih efektif di tingkat akar rumput.

Pengelolaan keuangan desa juga dilandasi oleh prinsip akuntansi sektor publik yang memberikan pendekatan sistematis dalam mengelola dana publik. Sebagaimana dikemukakan oleh (Ramadhani & Prasetyo, 2021), akuntansi sektor publik bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dan pemanfaatan sumber daya publik dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam praktik pengelolaan keuangan desa terbukti mampu meningkatkan akurasi dan kelengkapan pelaporan keuangan, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab oleh para pemangku kepentingan desa (Lestari & Yuliani, 2022). Selain itu, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), tetap sangat relevan bagi tata kelola desa. Prinsip-prinsip ini, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, daya tanggap, dan efektivitas, berfungsi sebagai norma-norma panduan untuk meningkatkan administrasi publik dan pengelolaan keuangan di tingkat lokal (Sako A. R. K., 2024). Integrasi nilai-nilai tata kelola ini penting tidak hanya untuk kepatuhan terhadap peraturan tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan hasil pembangunan berkelanjutan..

Berdasarkan landasan teori tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan keuangan aparatur desa melalui pelatihan terstruktur dan pendampingan langsung. Program ini dilaksanakan di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dan juga ditujukan kepada warga masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan pelaku pemerintahan daerah dan mendorong praktik tata kelola yang inklusif, inisiatif ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemerintahan desa yang lebih profesional, partisipatif, dan akuntabel.

## **2. Metodologi Penelitian**

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengelolaan administrasi dan keuangan, pelaksana pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknik penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan praktik langsung tentang pengelolaan administrasi dan keuangan. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan administrasi dan keuangan, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktik. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Peserta diberikan pemahaman mendasar tentang konsep pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Materi mencakup pentingnya penyusunan dokumen administrasi yang rapi, tertib, serta pentingnya akuntabilitas keuangan dalam mendukung pemerintahan desa yang transparan dan profesional.
- Langkah 2 : Setelah penyampaian materi, peserta diberi ruang untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan melakukan klarifikasi terhadap materi yang belum dipahami sepenuhnya. Diskusi ini bertujuan untuk membangun pemahaman kritis dan menjembatani antara teori dan praktik lokal yang dihadapi peserta.
- Langkah 3 : Dalam sesi ini, peserta secara langsung mempraktikkan proses penyusunan dokumen administrasi desa, pembukuan sederhana, hingga penyusunan laporan keuangan.

Kegiatan ini dirancang agar peserta mampu mengembangkan keterampilan teknis yang relevan dengan tugas sehari-hari di lingkungan pemerintahan desa.

- Langkah 4 : Tim pelaksana memberikan pendampingan dalam menyusun dokumen dan pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peserta juga diberikan contoh format dan alat bantu administrasi yang dapat digunakan di desa masing-masing.
- Langkah 5 : Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pemahaman dan keterampilan peserta. Hasil praktik peserta dianalisis secara bersama untuk mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang masih perlu ditingkatkan. Evaluasi ini bertujuan sebagai umpan balik bagi peserta maupun tim pelaksana dalam merancang kegiatan lanjutan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Istilah administrasi berasal dari kata Latin *ad* yang berarti "kepada", dan *ministro* yang berarti "melayani". Secara etimologis, administrasi dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan atau pengabdian yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Dalam wacana administrasi publik kontemporer, pengertian ini diperluas untuk mencakup kolaborasi yang sistematis dan bertujuan antara individu atau entitas untuk mewujudkan tujuan organisasi atau publik melalui proses yang terkoordinasi (Arisdiyoto et al., 2024). Administrasi, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup serangkaian kegiatan terstruktur yang memungkinkan berfungsinya lembaga secara efektif, khususnya melalui pengelolaan informasi, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan. Konsep tradisional, yang sering kali terbatas pada fungsi klerikal atau kesekretariatan, telah berkembang secara signifikan sejalan dengan tuntutan tata kelola modern dan kompleksitas organisasi (Gibran et al., 2021). Pekerjaan administrasi tidak lagi hanya tentang pencatatan atau dokumentasi, tetapi juga tentang memastikan keakuratan, aksesibilitas, dan penggunaan data yang strategis untuk perencanaan dan akuntabilitas kelembagaan.

Manajemen administrasi, oleh karena itu, mengacu pada penanganan sistematis arus data dan informasi dalam suatu organisasi. Ini mencakup proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, penyimpanan, duplikasi, dan penyebaran informasi tertulis atau digital (Dharsana et al., 2023). Ketika dilakukan secara efektif, proses-proses ini tidak hanya mendukung kebutuhan operasional suatu organisasi tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pengambilan keputusan, transparansi, dan responsivitas (Juniyanto et al., 2023). Lebih jauh, dalam konteks pemerintahan desa, praktik administrasi yang efektif sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pembangunan. Sistem administrasi yang terorganisasi dengan baik dapat meningkatkan pemberian layanan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan memperkuat kapasitas pemerintahan desa untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang dinamis (Rahayu et al., 2022). Oleh karena itu, administrasi bukan hanya sekedar fungsi teknis, tetapi merupakan komponen strategis kinerja sektor publik dan kredibilitas kelembagaan (Dewi et al., 2022).

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada penguatan tata kelola administrasi dan keuangan di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat desa serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan melalui pendekatan workshop dan pelatihan partisipatif ini memberikan ruang bagi peserta untuk tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya secara langsung melalui diskusi dan praktik. Beberapa hal yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

#### 3.1 Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran

Peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya tata kelola administrasi dan keuangan yang baik. Hal ini tercermin dari hasil diskusi aktif dan pertanyaan yang diajukan oleh peserta mengenai praktik administrasi dan pelaporan keuangan. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum memahami peran penting administrasi dalam mendukung akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan desa (Novalia et al., 2024).

### **3.2 Kemampuan Teknis Menyusun Dokumen Administrasi dan Laporan Keuangan**

Melalui praktik langsung, peserta dilatih untuk menyusun dokumen administrasi desa seperti buku agenda, buku ekspedisi, dan laporan keuangan sederhana berbasis kas dan akrual. Peserta juga dibimbing untuk menyusun pembukuan UMKM secara sistematis. Hasil praktik menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menyusun laporan dasar dengan format yang sesuai ketentuan (Soejono et al., 2023).

### **3.3 Perubahan Sikap terhadap Akuntabilitas dan Transparansi**

Pelatihan ini mendorong peserta, khususnya aparat desa, untuk lebih terbuka dan menyadari pentingnya transparansi dalam setiap kegiatan keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang ditegaskan oleh UNDP (Sako, 2024), yang menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan.

### **3.4 Identifikasi Tantangan dan Kebutuhan Tindak Lanjut**

Dari hasil evaluasi pelatihan, ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berpotensi menghambat pengelolaan administrasi yang efisien. Peserta menyatakan perlunya pelatihan lanjutan, khususnya yang terkait dengan digitalisasi administrasi desa (Purba et al., 2024).

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan administrasi dan keuangan berbasis partisipatif efektif dalam membangun kapasitas aparatur desa. Temuan ini mendukung teori administrasi publik yang dikemukakan oleh Henry Fayol bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang efisien (Baderan & Napu, 2020). Apabila perangkat desa memahami fungsi-fungsi tersebut, maka mereka akan lebih mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara terstruktur. Selanjutnya pendekatan *New Public Management* menurut Hood (Sako, 2024) yang menekankan efisiensi dan manajemen berbasis kinerja tercermin dalam metode pelatihan berbasis evaluasi langsung. Pelatihan ini memberikan gambaran bagaimana prinsip sektor swasta dapat diadaptasi ke dalam sistem administrasi publik untuk meningkatkan output dan kinerja layanan.

Dari perspektif manajemen keuangan, hasil dari program pelatihan memperkuat pernyataan ilmiah terkini bahwa penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan transparansi, akurasi, dan efisiensi pelaporan keuangan di lembaga pemerintah. Seperti yang disorot oleh (Lestari et al., 2023), bahkan pengenalan konsep akrual yang disederhanakan dapat berfungsi sebagai titik masuk yang strategis untuk membangun tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel dan berbasis data. Meskipun pelatihan yang dilakukan di Desa Bajo difokuskan pada praktik akuntansi akrual dasar, pemahaman dasar ini menandai langkah penting menuju pelembagaan bertahap prosedur manajemen keuangan yang lebih kuat dan terstandarisasi. Secara garis besar, respon positif dan perbaikan yang dapat diamati pasca intervensi menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang berlandaskan pendekatan edukatif-praktis efektif dalam mengatasi tantangan pengelolaan administrasi dan keuangan di tingkat desa. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Saragih et al., 2024), yang berpendapat bahwa model pelatihan partisipatif meningkatkan kapasitas adaptif lembaga lokal dan mendorong pengembangan kompetensi pemecahan masalah di kalangan aparat desa.

Namun, keberlanjutan dari perbaikan tersebut memerlukan dukungan berkelanjutan dan tindak lanjut programatik. Hal ini mencakup program peningkatan kapasitas secara berkala, transformasi digital sistem administrasi, dan penguatan kerangka regulasi daerah yang memastikan konsistensi kelembagaan dan kepastian hukum dalam praktik tata kelola. Tanpa dukungan sistemik tersebut, hasil awal dari program pengabdian kepada masyarakat berisiko menjadi terfragmentasi atau tidak berkelanjutan seiring berjalannya waktu (Rahayu et al., 2022). Oleh karena itu, komitmen jangka panjang dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari lembaga akademis hingga pemerintah daerah sangat penting untuk melembagakan profesionalisme administrasi dan akuntabilitas keuangan di tingkat desa.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi dan keuangan di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparat desa serta pelaku UMKM. Melalui pendekatan workshop partisipatif yang mengintegrasikan penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga keterampilan teknis yang aplikatif dalam menyusun dokumen administrasi dan laporan keuangan sederhana.

Temuan penting dari kegiatan ini menunjukkan bahwa persoalan lemahnya tata kelola administrasi dan keuangan di tingkat desa lebih disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya akses terhadap pelatihan teknis yang relevan, bukan semata karena keterbatasan regulasi. Dengan fasilitasi yang tepat dan metode pendampingan yang intensif, aparat desa terbukti mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam praktik administrasi dan keuangan desa. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program penguatan kapasitas berbasis kebutuhan lokal, serta perlunya integrasi antara edukasi teknis, transformasi digital, dan dukungan kebijakan daerah untuk menjamin konsistensi dan profesionalisme tata kelola desa di masa mendatang.

#### Referensi

- Arisdiyoto, I., Aviani, N., Handayani, D. N., Afhiani, S. N., & Apriyani, E. (2024). Edukasi Masyarakat Terkait Batas Wilayah melalui Sosialisasi Tertib Administrasi Batas Wilayah di Lingkungan Rukun Warga Kelurahan Sungai Jawi Kota Pontianak . *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4 SE-Articles), 529–539. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i4.2933>
- Baderan, U. S., & Napu, B. (2020). Peran bumdes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa ayuhula kecamatan dungaliyo kabupaten gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 3(2), 66–72. [10.31314/jsap.3.2.66-72.2020](https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.66-72.2020)
- Dewi, R. R., Wibowo, S. M., & Nadifah, M. (2022). Pelatihan Meningkatkan Pemahaman Pelaku UMKM Menyusun Laporan Keuangan Sederhana(UMKM Kompeten di Bekasi) . *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1 SE-Articles), 15–23. <https://doi.org/10.35912/jpe.v1i1.1008>
- Dharsana, M. T., Nirwana, N., Mediaty, M., Rasyid, S., Rura, Y., Nagu, N., Mahyuddin, N. I., & Syarif, M. N. I. (2023). Meningkatkan Efisiensi Penatausahaan Belanja Daerah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan . *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 4(2 SE-Articles), 203–210. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i2.2425>
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1 SE-Articles), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>
- Juniyanto, E., Nugraha, E., & Dewindaru, D. (2023). Pendampingan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Firdaus . *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 4(1 SE-Articles), 103–115. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.1864>
- Kurniawan, D., & Lestari, R. (2022). Managerial capacity and budget accountability in village financial management. *Journal of Governance and Development*, 11(2), 154–169.
- Lestari, P., Sari, R. N., & Nugroho, A. (2023). Digital transformation in village administration: Opportunities and challenges in strengthening public accountability. *Journal of Village and Rural Development*, 5(1), 33–47. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v9n2.p58-72>
- Lestari, P., & Yuliani, D. (2022). Strengthening accrual-based accounting in village financial reporting: Challenges and strategic solutions. *Journal of Public Sector Accounting and Finance*, 4(1), 33–48.
- Machmud, J., Baderan, U. S., & Azis, I. (2018). Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 1(2), 1-12. <https://doi.org/10.31314/jppe.v1i2.840>
- Novalia, N., Kurniawan, M., Sudiyanto, T., Mursalin, M., Suhada, S., & Puspita, S. (2024). Penguatan UMKM Simbang Sender melalui Pelatihan Manajerial bagi Para Pelaku Usaha. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 5(2 SE-Articles), 243–253.

<https://doi.org/10.35912/yumary.v5i2.3093>

- Prasetya, D. R., & Winarsih, I. (2023). Peran manajemen administrasi dalam memperkuat kinerja kelembagaan di sektor publik. *Jurnal Dinamika Administrasi Publik*, 8(1), 45–59.
- Purba, S., Simanjuntak, R. M. P., Simanjuntak, R., Andy, S., Girsang, C., & Sihombing, V. (2024). Optimalisasi Implementasi ISAK 35 dalam Organisasi Nonprofit: Upaya Sosialisasi di Panti Asuhan Pelita Harapan . *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 4(4 SE-Articles), 589–596. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i4.2953>
- Putra, A. H., & Safitri, M. (2022). Revisiting classical administrative theory in local governance: The relevance of Fayol's principles in village financial management. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 6(1), 21–34.
- Putri, A. N., & Santosa, H. (2022). Mendefinisikan ulang administrasi perkantoran di era digital: Studi kasus di lembaga pemerintahan desa. *Jurnal Kajian Administrasi Indonesia*, 6(2), 98–113.
- Putri, M. A., & Hidayat, Y. (2022). Capacity building and accountability in village fund management in post-decentralization Indonesia. *Journal of Local Governance Innovation*, 6(2), 121–136.
- Rahayu, R., Roza, H., Edmawati, S. D., & Karib, A. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Keuangan: Studi Pada BUMNAg di Sumatera Barat . *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1 SE-Articles), 7–13. <https://doi.org/10.35912/jpe.v1i1.737>
- Rahmawati, E., Harahap, R. A., & Lestari, D. (2021). Memperkuat tata kelola administratif di lembaga desa: Tantangan dan inovasi. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Pedesaan*, 5(1), 61–75.
- Ramadani, D., & Syafitri, R. (2021). The role of village funds in enhancing rural development in the era of fiscal decentralization. *Journal of Public Sector Economics and Policy*, 4(3), 85–100.
- Ramadhani, I., & Prasetyo, A. D. (2021). The role of public sector accounting in supporting accountability in village financial management. *Journal of Local Government and Policy Studies*, 3(2), 112–128.
- Sako A. R. K., U. . P. (2024). Perencanaan Skenario Dalam Pengembangan Wisata Benteng Otanaha di Kota Gorontalo. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1273–1289. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.399>.
- Sako, U. (2024). The Influence of Recruitment Patterns and Discipline on Employee Work Effectiveness at Muhammadiyah University Gorontalo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial Dan Politik (J-EMSPOL)*, 1(2), 71–82. [10.69623/j-emspol.v1i2.6](https://doi.org/10.69623/j-emspol.v1i2.6)
- Saragih, S., Nur, N., Junita, I., Kristine, F., Mariana, A., Widiastuti, R., & Lu, C. (2024). Penguatan Daya Saing UMKM melalui Pelatihan Manajemen Kualitas . *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 4(3 SE-Articles), 337–346. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i3.2661>
- Soejono, F., Kusmawati, K., Nicholas, N., & Timothy, T. (2023). Financial Statement Analysis Training for the Management of Rukun Palembang Cooperative. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 4(2 SE-Articles), 263–273. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i2.2579>
- Widodo, J., & Santoso, R. (2021). Building transparency and accountability in village financial management: Evidence from participatory practices. *Journal of Rural and Regional Innovation*, 5(2), 73–88.
- Yusuf, M. A., Nugraha, R., & Firdaus, M. (2023). Strengthening citizen participation in village governance: Between formal structures and practical constraints. *Journal of Community Empowerment and Policy*, 7(1), 42–58.